

DAFTAR ISI

1. *Public Private Community Partnership* dalam Pembangunan Terminal Transit Paso Kota Ambon
MIKE J. ROLOBESSY _____ **1-15**
2. Peran Komunikasi dan Penggunaan Media Massa pada Kelompok Peternak Sapi di kabupaten Maluku Tenggara
VRANSISCA KISSYA _____ **16-30**
3. Rezin Politik dan Problem Pembangunan di Indonesia
NURAINY LATUCONSINA _____ **31-41**
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah
ISRA MUKSIN _____ **42-50**
5. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
YUDI DE FRETES _____ **51-60**
6. “Perilaku Masyarakat Terhadap Budaya Hidup Bersih” (Studi Kasus Pada Masyarakat Negeri Batu Merah Kampung RT 03 / RW 03Kecamatan Sirimau Kota Ambon).
BAHRUDIN HASAN _____ **61-70**
7. Program Jamkesmas di Puskesmas Tomalehu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
ILYAS IBRAHIM _____ **71-80**
8. Penegakan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik yang Berkualitas Di Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon
HEIN EDUARD SIMATAUW _____ **81-90**
9. Efektifitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2dtk) Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
SITI GAIF NINGKEULA _____ **91-106**
10. Analisa Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Pulau Pulau Kur Kota Tual
LUSIA RENTANUBUN _____ **107-139**
11. Peran Institusi Lokal dalam Mencegah Konflik Sosial antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Waihatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
ISHAKA LALIHUN _____ **140-166**

REZIM POLITIK DAN PROBLEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Oleh:
NURAINY LATUCONSINA*

Abstrak

Dalam rentang sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, Dimasa revolusi fisik sampai pada masa pergerakan nasiona, perencanaan negara selalu tidak dapat dilaksanakan karena serangkaian terjadi peristiwa besar yang mengancam keselamatan negara. Seluruh elemen negara disibukkan dengan upaya perjuangan mempertahankan kedaulatan negara, sehingga pembangunan nasional menjadi terbengkalai. Disamping itu Perencanaan nasional selalu mengalami perubahan dari orde yang satu ke orde yang lain karena pergantian rezim selalu dimaknai sebagai koreksi total terhadap rezim yang lalu dengan segala program politiknya termasuk perencanaan yang dihasilkan. Perencanaan Nasional apapun bentuknya, ketika telah menjadi dokumen perencanaan negara maka butuh komitmen, kontrak politik dan kontrak sosial untuk mendekatkan perencanaan dengan dasar kebutuhan masyarakat.

Ideologi politik suatu negara akan menentukan dengan cara mana sebuah perencanaan dalam negara tersebut akan dibuat. Dalam menyusun strategi pembangunan Indonesia moderen maka cara pandang dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan kedaulatan anggaran yang harus memuat kepentingan seluruh warga negara dengan menjadikan peta negara (Geopolitik) sebagai dasar pertimbangan penyusunan Perencanaan Nasional.

Kata Kunci: Rezim Politik , Problem Perencanaan Pembangunan.

A. PENDAHULUAN

Dalam aspek perencanaan pembangunan, banyak pakar telah menyimpulkan bahwa pekerjaan yang amat sulit adalah menyusun perencanaan pembangunan suatu negara karena kerap kali berkaitan dengan aspek lain yang multi dimensional. Apalagi pada negara developing country seperti Indonesia, pekerjaan pembangunan yang tersulit hingga kini adalah upaya menanggulangi kemiskinan absolut sehingga membutuhkan model perencanaan nasional tepat.

Dikatakan oleh Cahyat, Gönner dan Haug (2007:3) kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan, sedangkan lingkaran setan kemiskinan menurut Kunarjo

* Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura, Ambon

(2000:2-3) adalah pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah bukan hanya mempengaruhi tingkat pendidikan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan yang rendah sehingga produktivitas sumber daya yang ada juga menjadi rendah. Oleh karenanya dalam memutuskan lingkaran setan itu maka perencanaan pembangunan harus disusun sebaik mungkin sehingga dapat dioperasionalkan dengan baik dalam upaya memutuskan mata rantai lingkaran setan itu.

Pada sisi lain dijelaskan oleh Conyers dan Hills (1984:3) bahwa perencanaan pembangunan lebih terkait dengan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tentang alternatif pemanfaatan sumber daya yang ada dengan maksud mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sebagai suatu proses menentukan proyeksi dan prioritas yang berkaitan dengan langkah atau tahapan-tahapan tertentu baik yang sudah tertata dengan rapi maupun tahapan-tahapan yang berkembang secara alamiah. Tahapan-tahapan ini dengan sendirinya akan melibatkan berbagai aspek di luar perencanaan, baik menyangkut aktornya, resources, data base maupun aspek lingkungan strategis dimana suatu perencanaan dibuat.

Dikatakan demikian karena keterkaitan antara perencanaan dengan faktor lain diungkapkan oleh Conyers dan Hills berupa lingkungan sosial, administrasi dan khususnya lingkungan politik dimana perencanaan itu akan dilaksanakan nantinya. Lingkungan politik menjadi penting untuk diperhatikan karena mempertimbangkan langsung sistem politik di negara yang menerapkan perencanaan itu (cara pemimpin memperoleh kekuasaan, apakah menggunakan sistem satu partai atau multi partai dan derajat sentralisasi atau desentralisasi, apalagi situasi politik ketika itu), ideologi politik pemerintah yang berkuasa dan struktur sosial masyarakat, Conyers dan Hills (1984:17). Secara khusus, tulisan ini akan menggambarkan tentang bagaimana pengaruh aspek politik di dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, dengan terlebih dahulu melihat tinjauan teoritis tentang keterkaitan antara politik dan perencanaan untuk menemukan wilayah dimana ada interaksi antara aspek politik (terutama gejolak politik dalam negara) dengan perencanaan nasional yang telah disusun.

Melalui gambaran latar belakang sebagai mana telah diuraikan di atas maka masalah yang perlu dirumuskan untuk ditelusuri dalam kaitan historika gejolak politik dan perencanaan nasional Indonesia adalah : Bagaimana pengaruh gejolak politik terhadap perencanaan nasional dalam rentang sejarah Indonesia?

B. Pembahasan

Dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, tahun 1947 terbentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, yang ketuanya pada saat itu adalah Drs. Mohammad Hatta. Hasil kerja dari panitia ini berupa rencana induk yang diberi nama Dasar Pokok dari pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia, dalam (<http://hyasintus.blogspot.co.id>). Perencanaan nasional di saat itu masih mengutamakan bidang ekonomi

oleh karena problem kualitas hidup rakyat secara ekonomis sangat memperhatikan (walaupun tidak mengabaikan aspek lain seperti masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Sehingga dikatakan oleh Alfian (1980:73) bahwa "Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional" tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu.

Keadaan negara pada saat itu bergolak akibat agresi militer belanda I itu dikarenakan tidak diterimanya hasil keputusan Linggajati oleh belanda hingga terjadi perang antara tanggal 21 juli sampai dengan 5 agustus 1947. Agresi militer belanda berlanjut dalam tahap yang ke-II yang kemudian dikenal dengan agresi militer belanda II (19 desember 1948-21 sampai dengan 24 januari 1949). Akibat pergolakan ini perencanaan nasional tidak terlaksana, hingga akhirnya dibuatlah dokumen lain berupa perencanaan beberapa sektor perekonomian yang dikenal sebagai Plan Produksi Tiga tahun RI, yakni perencanaan nasional dengan rentang waktu dari tahun 1948 sampai dengan 1950.

Perencanaan ini tidak terlaksana karena negara dihadapkan pada gejolak nasional dimana kemudian Indonesia mengalami perubahan bentuk struktur kenegaraan dari kesatuan menjadi serikat dengan diproklamirkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Van Mook tahun 1950. Sampai dengan tahun 1952 dan dibuatlah berbagai perencanaan darurat untuk menyelesaikan permasalahan yang mendesak ketika itu. Namun situasi bernegara saat itu terus bergolak menyebabkan berbagai rencana inipun gagal dilaksanakan.

Tahun 1952 dibentuklah Biro Perancang Negara, di bawah Kementerian Negara Urusan Pembangunan, yang dijabat oleh Ir. H. Djuanda. Upaya mereka kemudian menghasilkan suatu konsep perencanaan baru yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960. Sayangnya, kehidupan politik dalam negeri saat itu telah menghambat pelaksanaan RPLT ini, maka melalui dekrit presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan konstitusi negara kepada pelaksanaan UUD 1945, dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin.

Tugas dewan ini yakni menyusun rencana pembangunan yang kemudian dikenal dengan Rencana Pembangunan Semesta Berencana (Comprehensive National Development Plan) untuk jangka waktu 1961-1969. Melalui Penetapan Presiden No 12 tahun 1963 (Penpres 12/1963), Depernas dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kehidupan politik bangsa bernegara pada saat itu, yang

ditandai dengan Perjuangan Pembebasan Irian Barat, kemudian Penentangan berdirinya negara Malaysia serta berujung pada Pemberontakan G 30 S/PKI, telah mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan berencana, namun pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde lama) antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPRS yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Berakhirnya pergolakan politik nasional ketika itu ditandai dengan mundurnya Presiden Soekarno melalui penyerahan kepemimpinan nasional kepada Mayjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Pemerintahan baru di tangan Soeharto kemudian berusaha memperbaiki perekonomian negara dengan dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet No 15/EK/IN/1967 yang menugaskan Bappenas membuat rencana pemulihan ekonomi dengan dokumen yang dihasilkan berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I), untuk kurun waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 1973.

Pada periode kepemimpinan Soeharto situasi politik terkendali sedemikian rupa terutama melalui intervensi pihak militer sehingga proses perencanaan dapat berjalan sesuai agendanya nasional, bahkan output yang dihasilkan dari proses perencanaan juga cukup terukur. Tahun 1966 merupakan babak awal, terjadi perubahan tatanan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan orde lama berakhir dan pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Soeharto dimulai. Kebijakan dasar yang digunakan oleh pemerintahan baru adalah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 digunakan sebagai landasan ideal segala kegiatan, sedangkan UUD 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusional. Anti kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dikumandangkan sebagai strategi menata kesatuan dan persatuan bangsa. Dikatakan oleh Rahardjo (1979:12) bahwa orientasi pemerintahan orde baru ditekankan pada pembangunan bidang ekonomi, sehingga peran politik revolusioner mulai dikesampingkan. Setelah kehidupan politik mulai kondusif dan terkendali MPR segera menyusun GBHN. Haluan negara yang dituangkan dalam Tap MPR ini wajib dijalankan oleh Presiden selaku mandataris MPR, karena Presiden

diangkat dan bertanggung jawab pada MPR. Dalam hal ini, Presiden tidak neben tapi untergeornet kepada MPR.

GBHN dimaksudkan menjadi arah bagi perjalanan negara dalam mengelola pembangunan, pemeritahan dan kegiatan sosial kemasyrakatannya. Dalam kurun waktu 32 tahun pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, MPR telah berhasil menetapkan sebanyak 6 GBHN (GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998). Artinya setiap sidang 5 tahunan, MPR menjalankan tugas rutin menyusun dan menymentapkan GBHN yang akan diamanatkan kepada Presiden.

Rutinitas yang dilakukan oleh MPR ini seakan tidak melihat faktor riil kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, ini semua dapat dilihat dari format dan rumusan Tujuan Pembangunan Nasional dari keseluruhan GBHN tersebut satu sama lain memiliki kesamaan yaitu Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana peri kehidupan Bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Kesamaan ini lebih dikarenakan posisi DPR-MPR Ketika itu telah terkooptasi oleh kekuatan eksekutif (Soeharto) dan hanya berfungsi sebagai ruber stamp. Kekuasaan negara terkontrol ketat oleh birokrasi dengan diback up oleh ABRI, sehingga birokrasi Indonesia lebih berwatak Otoritarianisme-Birokratik. Menurut O'Donnell dalam Mas'ood (1989:10) mengatakan rezim ototiterisme-birokratik memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 1. Pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan teknokrat sipil 2. Ia didukung oleh enterpreneur oligopolistik, yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis Internasional. 3. Pengambilan keputusan dalam rezim OB bersifat birokratikteknokratik, sebagai lawan dari politik dalam pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses bargaining yang lama antara kelompok-kelompok kepentingan. 4. Masa di demobilisasikan 5. Untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan tindakan-tindakan refresif.

Bila pendapat O'Donnell dikaitkan dengan kenyataan Indonesia dibawah kepemimpinan rezim Soeharto, nampak antara militer dengan birokrasi terdapat hubungan mutualistik luar biasa dalam bentuk patron-clien (militer menyuplai kader untuk birokrasi). Pada banyak lembaga-lembag teknokratik terjadi korporasi sipil-militer (Pertamina, PAL, Bulog, PLN, Telkom) dan sebagainya.

Pemerintahan Orde Baru membangun imunitas rezimnya dengan menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya. Untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan konsensus nasional. Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya, namun semua itu hanyalah slogan belaka. Pengambilan keputusan lebih bersifat teknokratis namun dibawah kontrol politik yang ketat. GBHN boleh disusun oleh kaum teknokrat namun dikontrol oleh para politisi dalam rangka menyukseskan agenda dan daya jelajah Golkar sebagai mayoritas tunggal (pemenang setiap pemilu) dimasa itu. Tidaklah mengherankan kalau konsep tujuan negara dan jabarannya dari waktu ke waktu juga berstatus menunggu untuk distempel pada setiap ahir pemilu. GBHN lebih bersifat doktrinatif ketimbang policy, taktis, strategis dan teknis dari rencana suatu bangsa. Akhirnya ketika orde berganti konsep GBHN lalu dianggap sebagai pelengkap situs sejarah dan tidak memiliki kekuatan keberlanjutan dalam penerapannya.

Pada sisi lain harus diakui pula bahwa masa proses pembangunan nasional di masa ini terus mengalami penigkata, kapasitas hidup masyarakat, lapangan kerja dan pendapatan perkapita mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa orde lama. Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional yang doktrinatif itu. Itulah sebabnya di jaman orde lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di masa orde baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V, dan Repelita VII.

Menurut Chaniago (2001:8), penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai "Pahlawan Reformasi".

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Haru diakui salah satu keberhasilan yang dapat dilihat yakni adanya swasembada pangan sebagai dampak dari proses perencanaan pembangunan yang dibuat pada saat itu. Tentu saja keberhasilan ini tidak menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan Soeharto itu baik adanya, sebab sekalipun secara ekonomi Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan nasional namun aspek-aspek lain seperti demokrasi, humanisme dan HAM sangatlah terpuruk. Konteks pembangunan yang dikembangkan pada jaman Soeharto adalah konteks pembangunan ekonomi bukan pembangunan nasional sebab pembangunan nasional tidak hanya melihat peningkatan ekonomi sebagai indikatornya tetapi semua aspek yang berkaitan seperti pembangunan fisik, pembangunan pendidikan, pembangunan politik, pembangunan sosial, pembangunan administrasi dan sebagainya, namun Soeharto berhasil merubah tatanan hidup Indonesia dari suatu negara tradisional menjadi Indonesia moderen saat ini.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat pada rapat paripurna ke 12, sidang umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999, menetapkan TAP/IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004. GBHN 1999-2004 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan Negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi Negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan Negara dan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dilakukan segera kurun waktu itu. Dalam Propenas (2000-2004:7) dikatakan sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 arah kebijakan penyelenggaraan Negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selanjutnya Propenas diperinci dalam rancangan Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 maka terjadi pula perubahan konsep yuridis terkait kebijakan pembangunan nasional melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, ini berarti sekaligus Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak dikenal lagi. Undang-Undang RPJPN bermula saat pemerintah mengajukan draft RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Rancangan Undang-Undang tentang RPJPN ini merupakan tindak lanjut atas Surat Presiden No. R-01/PU/III/2005 tertanggal 18 Maret 2005 yang telah disampaikan kepada DPR. Usaha tersebut merupakan konsekuensi atas keluarnya Undang-Undang NO 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1), yang mengamanatkan adanya suatu dokumen negara mengenai perencanaan jangka panjang.

Di sisi lain, Campbell dan Fainstain (1999:1) menyatakan bahwa dalam pembangunan kota atau daerah dipengaruhi sistem ekonomi kapitalis atau demokratis. Dalam konteks tersebut maka pada prakteknya perencanaan tidak dapat dipisahkan dengan suasana politik kota atau daerah sebab keputusan-keputusan publik mempengaruhi kepentingan-kepentingan lokal. Hal ini menjadi relevan apabila kekuasaan mempengaruhi perencanaan. Ketika perencanaan telah dipengaruhi oleh sistem politik suatu kota atau daerah sebagaimana pernyataan di atas, maka sebenarnya yang terjadi adalah wilayah rasional yang menjadi dasar dalam perencanaan telah kehilangan independensinya. Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan efisien, bersifat mendua antara idealisme "kepakaran seorang perencana" atau mengikuti selera atau kemauan-kemauan, sehingga berimplikasi pada kualitas perencanaan dalam pencapaian goal (tujuan) dan objektif (sasaran) yang dituju.

Dikatakan demikian karena menurut Friedmann (1992:22), perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik. Pada prinsipnya Friedmann menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan suasana publik disaat pergantian rezim mengalami konstaksi politik luar biasa dan berdampak pada penolakan terhadap segala ornamen politik dari rezim masa lalu perencanaan yang telah disusun.

Keterkaitan politik dan perencanaan pembangunan juga telah dijelaskan oleh Tjokroamidjojo (1988:54) bahwa walaupun secara spesifik ia mengkaitkannya dengan administrasi pembangunan dapat dilihat dari beberapa hal:

1. Aspek politik yang mempunyai pengaruh tibal balik dengan administrasi pembangunan adalah filsafat hidup bangsa atau

filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdependensi antara sistem politik yang dianut dengan admintrasi pembangunan.

2. Komitmen dari elite kekuasaan pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaan menerima pendekatan yang sungguh- sungguh terhadap usaha yang saling terkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
3. Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik.
4. Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang pembangunan.

Di Indonesia hubungan antara pergantian rezim dengan buyarnya sistem perencanaan pembangunan nasional yang dapat dilihat dari perubahan dokumen dari rezim yang satu ke rezim yang lain. Perubahan dokumen itu adalah Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPRS menetapkan tiga ketetapan utama yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Kemudian dimasa pemerintahan presiden Soehato antara 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN yang menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat tertutup. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan tidak dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat seragam dan daerah harus mengikuti atau mengacu pada dokumen itu.

Dokumen Perencanaan periode 1998-2000. Pada periode ini lahir perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa.

Dokumen Perencanaan periode 2000-2004. Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR

menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Dokumen Perencanaan terkini menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN. Diujung pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ia menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa dalam menatap masa depannya yang lebih baik yakni UU nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini sekaligus menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam membicarakan tentang pengaruh politik terhadap perencanaan yaitu :

1. Dimasa revolusi fisik sampai pada masa pergerakan nasional, perencanaan negara selalu tidak dapat dilaksanakan karena terjadi serangkaian peristiwa besar yang mengancam keselamatan negara. Seluruh elemen negara disibukkan dengan upaya perjuangan mempertahankan kedaulatan negara.
2. Perencanaan nasional di Indonesia selalu mengalami perubahan dari orde yang satu ke orde yang lain karena pergantian rezim selalu dimaknai sebagai koreksi total terhadap rezim yang lalu dengan segala program politiknya termasuk perencanaan yang dihasilkan.
3. Perencanaan Nasional apapun bentuknya, ketika telah menjadi dokumen perencanaan negara maka butuh komitmen, kontrak politik dan kontrak sosial untuk mendekatkan perencanaan dengan dasar kebutuhan masyarakat.
4. Cara pandang Indonesia dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan kedaulatan anggaran yang harus memuat

kepentingan seluruh warga negara dengan menjadikan peta negara (Geopolitik) sebagai dasar pertimbangan penyusunan Perencanaan Nasional.

5. Ideologi politik suatu negara akan menentukan dengan cara mana sebuah perencanaan dalam negara tersebut akan dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1980, Memahami Strategi dan Proses Pembangunan Nasional , Leknas LIPI, Jakarta.
- Campbell, Scott; Fainstein, Susan S. (eds.) 1999., Readings in Planning Theory, second edition. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Chaniago, Andrinof A., 2001, Gagalnya Pembangunan kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar krisis Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Cahyat, Ade, Christian Gönner, dan Michaela Haug, 2007, Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia, Center for International Forestry Research, Bogor.
- Conyers, Diana and Peter Hills, 1984. An Introduction to Development Planning in the Third World, John Wiley series on public administration in developing countries, John Wiley & Sons Ltd. New York.
- Friedmann, John, 1992, Planning in the Public Domain: Discourse and Praxis, University Of California.
- <http://hyasintus.blogspot.co.id/2012/11/pengaruhpolitik-terhadap-perencanaan.html>, diakses 15 agustus 2016.
- Kunarjo, 2000, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, UI Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung.
- Propenas 2000-2004. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Redaksi Sinar Grafika, 2001. Jakarta:
- Tjokroamidjojo, Bintoro., 1988, Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta.